

**PELAKSANAAN PILAR PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT
DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012-2013**

Oleh :

KURNIA SEJAHTRA

Email : Kurnia_sejahtra@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

ABSTRAK

Program improve people's economy is one of the pillars of the five pillars of development designed by Kampar regent governed by Kampar District Regulation No. 12 of 2012 on the Medium Term Development Plan (RPJMD) Kampar . Improve people's economic pillar aims to create a society that is developing the potential of natural resources and community resources to build a solid democratic economy . However, the implementation of the pillars of improving people's economy has not done well and have not been able to change the economy of the community in its implementation in the district of Kampar Regency Tapung 2012-2013 .

This study was conducted to determine the causal factors and constraints why pillars improve people's economic program can not alter the economy of the community in its implementation in the district of Kampar subdistrict Tapung 2012-2013 . The location study was conducted in the District Tapung Kampar regency . Penelitian type is qualitative research with descriptive method.

The results showed that the implementation of the pillars of economic improvement of the people in the district of Kampar Regency Tapung years 2012-2013 has not done well and have not been able to change the community's economy . Some contributing factor is the factor of communication , resource factors , factors disposition , and factor structure of the bureaucracy . Some obstacles are programs , program implementers and program beneficiaries.

Keywords : Policy Implementation , Economic Improvement of the People

Pendahuluan

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah Indonesia sejak dulu. Namun realitas hingga saat ini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di Indonesia. Pemerintah Indonesia, selama melaksanakan pembangunan, baik pada masa orde lama, orde baru dan hingga kini di orde reformasi masih belum banyak mencapai keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Pembangunan dengan berbagai konsepnya yang telah dilakukan pemerintah masih nyata belum menyentuh perbaikan kondisi sosial masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan, hal tersebut terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1) mengamanatkan bahwa “pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah,” kemudian ayat (2) “dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Kabupaten Kampar adalah salah kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sangat besar baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dan memiliki karakteristik serta

kemajemukan. Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki berbagai macam permasalahan pembangunan, kependudukan, pengangguran dan saat ini fokus pada pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Alasan mendasar dari pemecahan kemiskinan adalah bahwa masalah kemiskinan dapat menimbulkan efek domino bagi pembangunan.

Dalam upaya mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar maka pemerintah Kabupaten Kampar membuat konsep pembangunan daerah yang disebut Lima Pilar Pembangunan Kampar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar. Adapaun pilar-pilar yang terkandung di dalamnya adalah (1) Peningkatan Akhlak Dan Moral (2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (3) Meningkatkan Ekonomi Rakyat (4) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan (5) Meningkatkan Infrastruktur. Pilar meningkatkan ekonomi rakyat adalah pilar yang fokus pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar dengan membuat program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S).

Berdasarkan data Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar penduduk miskin terbanyak pada tahun 2012-2013 berada pada Kecamatan Tapung. Program pilar meningkat ekonomi rakyat juga dilaksanakan di Kecamatan Tapung namun tingkat kemiskinan tetap tinggi.

Maka dari fenomena diatas penulis mengamati mengapa pilar meningkatkan ekonomi rakyat tidak

dapat merubah perekonomian masyarakat Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 dan apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat sebuah judul yaitu pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013.

Tinjauan Pustaka

George C. Edward III menamakan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Inderict Impact and Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.

Variable *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut yaitu : (1) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implentasi yang baik pula. (2) *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). (3) *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan sutu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

Variabel *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: (1) *Staf*, Kegagalan yang sering

terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagikan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompten dibidangnya. (2) *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. (3) *Wewenang*, Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. (4) *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah : (1) *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. (2) *Insentif*; Edward menyatakan bahwa salah satu tehnik yang sisarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Variabel *keempat* menurut Edward III, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan

Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dan menganalisa objek yang akan diteliti dengan merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif. Peneliti berupaya mendeskripsikan pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013. Melalui pendekatan kualitatif, tujuan penelitian pada intinya bertumpu pada usaha untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data mengenai pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat ini serta serta pengaruhnya terhadap perubahan ekonomi masyarakat.

Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Para informan ini adalah pelaksana dan peserta program pilar meningkatkan ekonomi rakyat, yang terdiri dari (Kepala Bidang Penyuluhan BPPKP, Camat Tapung, Kepala Desa dan masyarakat yaitu peserta dan alumni P4S). Hal ini

perlu diperhatikan supaya peneliti mendapatkan gambaran jelas mengenai pelaksanaan program tersebut.

Data-data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penyuluhan dan Camat Tapung difokuskan pada pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013. Dalam upaya pengumpulan data yang relevan dengan objek penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, yakni wawancara, observasi dan analisis dokumen. Pengumpulan data yang dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sekaligus mempermudah penyusunan penelitian tersebut.

Proses analisis dapat dilakukan semenjak data dikumpulkan. Pengolahan dan analisa data ini dilakukan dengan tetap mengacu pada teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan kemudian akan ditarik kesimpulan dan disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dikategorikan dan disesuaikan polanya terhadap permasalahan yang ada, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian deskripsi yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 2012-2013 belum terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dan dipengaruhi oleh hambatan-

hambatan seperti program, pelaksana program dan penerima program.

Pelaksanaan Pilar Meningkatkan Ekonomi Rakyat Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pada Tahun 2012-2013

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah kebijakan adalah komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terlalu panjang dan melalui beberapa tingkatan untuk kemudian sampai kepada masyarakat dan tidak merata kepada masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tapung.

- a. *Transmisi Komunikasi*, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- b. *Kejelasan Komunikasi*, yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan menjadi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa beberapa masyarakat masih ada yang belum mengetahui secara jelas mengenai pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung.
- c. *Konsistensi Komunikasi*, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa para pelaksana kebijakan tetap konsisten dalam menyampaikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu faktor lain yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan sebuah kebijakan akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa sumber daya

dalam pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 harus lebih ditingkatkan, baik dari aspek kualitas maupun dari aspek kuantitasi.

- a. *Staf*, sumber utama dalam implementasi suatu kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompten dibidangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa para pelaksana program pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 masih kekurangan staf pelaksana.
- b. *Informasi*, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum merata dan menyeluruh di desa-

desa di Kecamatan Tapung.

- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan memiliki kewenangan yang terbatas dalam pelaksanaannya.
- d. *Fasilitas*, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas membuat pelaksana tidak bisa melakukan banyak hal dalam pelaksanaan program.

3. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa semua

pelaksana menerima dan tidak ada penolakan.

- a. *Pengangkatan Birokrat*; sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pengangkatan birokrasi tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini.
- b. *Insentif*, salah satu tehnik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa ada dan tidak adanya insentif tidak menjadi permasalahan bagi pelaksana dalam melaksanakan program ini.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa kerja birokrasi

sebagai pelaksana program dinilai belum maksimal dalam melaksanakan program ini.

- a. *Standar Operating Procedures (SOPs)*, adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa perlu adanya SOPs yang dapat mengatur secara detil.
- b. *Fragmentasi*, upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan dapat melakukan penyebaran tanggung jawab dan kerja sama yang baik antara para pelaksana.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pilar Meningkatkan Ekonomi Rakyat Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013

1. Program

- a. *Memakai Agunan*
Pemerintah Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program

pilar meningkat ekonomi rakyat melakukan kerja sama dengan pihak perbankan menyangkut dengan permodalan. Sistem pinjaman memakai agunan dirasa menjadi suatu kendala bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pinjaman dengan agunan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini karena banyak masyarakat tidak dapat mencairkan pinjamannya.

b. *Tempat Pelatihan*

Sarana dan prasana yang mendukung dan memadai adalah salah satu syarat penting dalam pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Sarana dan prasana yang tidak memadai dalam pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat adalah keterbatasan tempat pelatihan yang hanya ada satu tempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa keterbatasan tempat pelatihan menyebabkan kurangnya daya serap peserta pelatihan.

c. *Jarak Tempat Pelatihan*

Jarak tempuh dalam implementasi sebuah kebijakan akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan

tersebut. Jarak tempuh berkaitan dengan keefektifan implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa jarak tempuh yang jauh menyebabkan peserta kurang berkeinginan untuk mengikuti program ini.

d. *Waktu Pelatihan*

Implementasi sebuah kebijakan tidak terlepas dari waktu pelaksanaan program dari sebuah kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa lamanya waktu pelatihan membuat peserta kurang berkeinginan untuk mengikuti pelatihan disebabkan tidak bisa meninggalkan keluarga.

2. **Pelaksana Program**

a. *Keseriusan Pelaksana*

Implementasi sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan melainkan harus dilaksanakan dengan serius dan gigih dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa keseriusan dan kegigihan yang tinggi maka keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan akan sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan informan menjelaskan bahwa keseriusan dan kegigihan pelaksana harus lebih ditingkatkan lagi.

- b. *Pengawasan Pelaksana*
Banyaknya karakter dari para pelaksana mengharuskan adanya pengawasan agar setiap para pelaksana ini berusaha untuk mewujudkan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksana masih dinilai kurang.
- c. *Evaluasi Kegiatan Pelaksana*
Salah satu yang harus menjadi pertimbangan pembuat kebijakan agar pelaksanaan kebijakan bisa mengarah pada keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mengevaluasi para pelaksana kebijakan kemudian menindaklanjuti evaluasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan kepada pelaksana masih belum maksimal.

3. Penerima Program

- a. *Lingkungan Sosial*
Latar belakang dan budaya yang berkembang

dalam lingkungan sosial penerima kebijakan turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat yang berbeda menyebabkan respon yang berbeda terhadap program tersebut.

- b. *Lingkungan Ekonomi*
Implementasi kebijakan turut dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi penerima kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa tingkat perekonomian masyarakat sebagai penerima kebijakan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini.
- c. *Pekerjaan Penerima Program*
Bentuk pekerjaan penerima kebijakan menjadi faktor yang bertentangan dengan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa penerima kebijakan tidak bisa mengikuti program tersebut karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk menafkahi keluarga.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 belum terlaksana dengan baik dan belum mampu untuk merubah perekonomian masyarakat di Kecamatan Tapung. Ada 3 faktor yang menyebabkan pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 belum mampu merubah perekonomian masyarakat. *Faktor pertama adalah komunikasi.* Kurangnya intensitas komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada penerima kebijakan menyebabkan penerima kebijakan belum memahami secara jelas mengenai pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan. *Faktor kedua adalah sumber daya.* Keterbatasan sumber daya pelaksana secara kualitas dan kuantitas menyebabkan pelaksanaan program ini belum terlaksana secara maksimal sehingga penerima kebijakan banyak belum mendapatkan informasi secara detil mengenai program tersebut, kemudian keterbatasan kewenangan dan fasilitas dari para pelaksana menyebabkan ruang gerak pelaksana menjadi sempit. *Faktor ketiga adalah struktur birokrasi.* Kegigihan birokrasi dalam melaksanakan program ini perlu ditingkatkan kembali

dan perlu dibuat standar operasi prosedur disemua lini sebagai acuan pekerjaan birokrasi.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012-2013 ada 3 faktor. *Faktor pertama adalah program.* Program yang dilaksanakan untuk penerima kebijakan masih belum sesuai dengan keadaan dari masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengikuti program yang sedang dilaksanakan. Pembuat kebijakan harus memahami mengenai keadaan penerima kebijakan agar program dapat terlaksana dengan baik. *Faktor kedua adalah pelaksana kebijakan.* Keseriusan dan kegigihan dari para pelaksana perlu ditingkatkan lagi dalam melaksanakan program ini sehingga dapat memotivasi masyarakat lebih banyak lagi untuk mengikuti program ini. *Faktor ketiga adalah penerima kebijakan.* Kondisi masyarakat selaku penerima kebijakan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi masyarakat tersebut. Keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian tersendiri dan kemudian dicari solusi yang tepat untuk meyelesaikan hal tersebut.

Saran

1. Pemerintahan Kabupaten Kampar harus lebih maksimal dalam upaya mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus memprioritaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan seperti faktor komunikasi, faktor, sumber daya, faktor disposisi dan faktor birokrasi.
2. Pihak Kecamatan Tapung sebagai pelaksana di wilayah kecamatan harus meningkatkan keseriusan dan kegigihan dalam melaksanakan dan mendukung sepenuhnya program-program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
3. Masyarakat sebagai penerima program harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar demi terlaksananya keberlangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar yang sejahtera.

Daftar Pustaka

I. Buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Creswell, W. John, 2003, *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, KIK Press.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta, Erlangga.
- Nugroho Dwijowijoto, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Siagian, P. Sondang, 2003, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Slamet, Yulius, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta, UNS Press.
- Suparmoko, M., 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, ANDI Yogyakarta
- Supriyadi Bratakusumah, Dedy., Solihin, Dedy., 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjojo, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, AW, 1998, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar

III. Sumber Lain

Sugiana, Puji Melita, 2012, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok*

Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan, Skripsi FISIP UI, Jakarta

Hardi, Rina *Opini Masyarakat Dalam Program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Masyarakat (P4S) Pemerintah Kabupaten Kampar*, Jurnal FISIP UR, Pekanbaru

<http://kamparkab.go.id/kesuksesan-p4s-karya-nyata>

<http://www.sapa.or.id/b1/penanggulangan-kemiskinan-program-p4s-kampar>

<http://suarakampar.com/berita/berita-tiga--program-kerja-dwp-mendukung-lima-pilar-pembangunan-kampar>